

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DALAM PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN WISATA ADAT ATAKKAE
DI KELURAHAN ATAKKAE KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Baso Syarif Hidayat

NPP. 29.1373

Asdaf Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan

Email: bsyarifh@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Atakkae Traditional Tourism Area in Atakkae Village, Tempe District, Wajo Regency is a historical heritage that needs to be developed for its potential. The development of the potential of the area in its implementation carried out by the Department of Youth, Sports and Tourism has not been optimal. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the implementation of the Youth, Sports and Tourism Office Policy in developing the potential of the Atakkae Indigenous Tourism Area, the inhibiting factors and efforts to overcome the inhibiting factors. **Method:** The design of this research is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The number of informants in this study was recorded as many as 16 people. **Result:** The results showed that the implementation of the Youth, Sports and Tourism Office Policy in developing the potential of the Atakkae Indigenous Tourism Area can be said to have not been fully running well, in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure which in its implementation in the field is still not optimal in accordance with the objectives. which has been set. **Conclusion:** Regional Government Priority Program policies, the implementation of the development of the potential of the Atakkae Indigenous Tourism Area is not yet optimal, the guidance and development of human resource competencies is still limited and the lack of use of social media and limited promotion of the Atakkae Indigenous Tourism Area. With the efforts made to overcome the inhibiting factors by coordinating with all relevant components both in the internal environment of the relevant agencies/services as well as the community and local tourists, making improvements with regular maintenance and cleaning, utilizing and maximizing the workforce or Human Resources (HR) available, facilitating the event or events being held followed by introducing the Atakkae Indigenous Tourism Area.

Keywords: policy implementation, tourism potential development, tourists

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kawasan Wisata Adat Atakkae di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo merupakan peninggalan sejarah yang perlu dikembangkan potensinya. Pengembangan Potensi Kawasan tersebut dalam implementasinya yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata belum optimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini

untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae, faktor-faktor penghambat dan upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat. **Metode:** Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jumlah informan dalam penelitian ini terdata sebanyak 16 orang. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dalam pelaksanaannya dilapangan masih belum maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. **Kesimpulan:** Kebijakan Program Prioritas Pemerintah Daerah, belum optimalnya penyelenggaraan pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae, masih terbatasnya pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta kurangnya pemanfaatan media sosial dan terbatasnya promosi mengenai Kawasan Wisata Adat Atakkae. Dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dengan melakukan koordinasi kepada seluruh komponen yang terkait baik di lingkungan internal badan/dinas terkait maupun masyarakat dan wisatawan lokal, melakukan pembenahan dengan perawatan dan pembersihan secara berkala, memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, memfasilitasi event atau acara yang diselenggarakan diikuti dengan memperkenalkan Kawasan Wisata Adat Atakkae.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, pengembangan potensi pariwisata, wisatawan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditinjau secara etimologi Yoeti dalam Octavia (2015:30) yakni: Pengertian pariwisata yang awal mulanya diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki kesamaan arti dengan tour, yang berarti berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata “pariwisata” terdiri dari dua suku kata yaitu “Pari” dan “Wisata”, pari yang berarti berputar-putar, banyak, berkali-kali, lengkap, dan wisata yang berarti bepergian, atau perjalanan”. Adapun menurut Carl Freadrich dalam Said Zainal Abidin (2004:21) mengatakan: Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di dalamnya terdapat hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (peluang), dan kebijakan yang diusulkan akan membantu mengatasi hambatan/kesulitan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kawasan wisata dapat dikembangkan dari berbagai segi sehingga berdampak terhadap minat para wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Pemerintah berperan untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan yang berpengaruh pada daya tarik pengunjung atau wisatawan yang mana segala aspek terkait kekhasan, keindahan, serta nilai yang pada umumnya berupa kekayaan alam, peninggalan budaya adat, serta hasil buatan manusia yang menjadi destinasi atau sasaran kunjungan dari para wisatawan domestik maupun internasional. Banyak potensi yang dimiliki Kawasan Wisata Adat Atakkae diantaranya potensi kekayaan adat dan budaya yang berupa beberapa entitas peninggalan sejarah, serta potensi wilayah yang berupa lahan kosong yang luas terdapat di dalam area kawasan tersebut dan danau buatan yang sudah ada sejak rentang waktu yang lama, hal ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk dialokasikan menjadi tambahan objek wisata. Apabila dilakukan pengembangan potensi di Kawasan Wisata Adat Atakkae akan menambah jumlah wisatawan dan tentunya berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD). Perlunya dilakukan pengembangan potensi oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan budaya adat yang telah ada sejak waktu silam dan untuk menghilangkan stigma masyarakat terhadap pemerintah. Menjadikan Kawasan Wisata Adat Atakkae sebagai objek alternatif masyarakat

dalam kegiatan refreshing, berlandaskan budaya sehingga kultur budaya di Kabupaten Wajo tetap ada dan eksis.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Perkembangan Kawasan Wisata Adat Atakkae pun dari tahun ke tahun semakin menurun dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana kawasan adat wisata tersebut banyak dikunjungi dan sering dijadikan lokasi beberapa event atau acara dari lintas kabupaten sampai lintas provinsi. Dalam pengelolaannya terdapat berbagai kendala baik itu dari pihak pemerintah, pengelola maupun para wisatawan itu sendiri, jika dilihat dari perkembangannya, pemanfaatan potensi yang dimiliki masih belum optimal, inovasi dan kreatifitas masih banyak menuai kekurangan, termasuk implementasi terhadap kebijakan dalam mengembangkan potensi belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kepariwisata Daerah dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata berisi kebijakan pembangunan kepariwisataan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Wajo dalam kebijakan pembangunan wilayah. Kondisi Wilayah Daerah dalam menunjang pembangunan kepariwisataan. Berisi keadaan fisik dan sejarah, serta kekayaan ekologi sebagai potensi pariwisata, kondisi sosial budaya sebagai potensi pariwisata dan perekonomian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi acuan bagi penulis untuk menambah referensi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya diantaranya Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Komo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara). Penelitian Lahamadi Feki (2016) tersebut memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilihat dari permasalahan penelitiannya yaitu terkait Implementasi Kebijakan dalam pengembangan pariwisata, menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori dari Edwards III. Strategi Pengembangan Potensi Objek Wisata Rumah Adat Karampuang Terhadap Sosial Budaya Masyarakat di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Penelitian Nuraimma (2018) tersebut memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilihat dari permasalahan penelitiannya yaitu memfokuskan kepada pengembangan potensi wisata, rumah adat, menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan serta teknik analisis data yang sama. Implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Alam Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Penelitian Neksan Neri A. (2020) tersebut memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilihat dari permasalahan penelitiannya yaitu implementasi, pengembangan destinasi, metode penelitian, teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang sama..

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian sebelumnya yakni dapat dilihat dari konteks penelitian berupa pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae, sedangkan penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada objek wisata seperti pada penelitian Lahamadi Feki dan Nuraimma. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada implementasi kebijakan, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasinya dalam pengembangan potensi kawasan wisata, berbeda dengan penelitian Neksan Neri A. Yang lebih banyak memiliki keterkaitan dengan program dari Dinas yang terkait.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae, faktor-faktor penghambat dan upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.

II. METODE

Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Disebutkan Dezin dan Lincoln dalam Moleong (2017) bahwa penelitian kualitatif ialah “Penelitian yang menafsirkan kejadian atau fenomena yang terjadi dengan mengedepankan latar belakang ilmiah, serta dilaksanakan dengan jalan yang mencakup berbagai metode yang ada”. Menurut pendapat Noor (2012:17) mengemukakan bahwa “Cara berpikir induktif mengacu pada kebenaran yang bersifat khusus, lalu diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan masalah yang bersifat universal atau umum”. Lofland dalam Moleong (2017) menyebutkan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kuantitatif yakni berupa perkataan dan perlakuan atau tindakan yang memuat data pendukung seperti dokumen dan lain-lain”. Berhubung dengan hal tersebut pada bagian ini jenis datanya di uraikan menjadi perkataan dan perlakuan atau tindakan, sumber data secara tertulis, foto beserta statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) mengemukakan: “aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing)”. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan jumlah informan dalam penelitian ini terdapat sebanyak 16 orang. Operasionalisasi Konsep mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae

Pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae merupakan salah satu program dan kebijakan yang dicanangkan dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo yang bersifat kultur budaya serta adat istiadat untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Kabupaten Wajo. Kebijakan program ini merupakan implementasi serta upaya pemerintah dalam memajukan daerah sehingga mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah kondisi Pandemi ini baik berupa masalah stigma akan wisata lokal, hilangnya kebanggaan akan daerah sendiri, serta tidak mau melestarikan kearifan lokal yang dimiliki. Hal ini juga merupakan usaha dari pemerintah untuk menjadikan Kawasan Wisata Adat Atakkae sebagai identitas asli Kabupaten Wajo sehingga lebih dikenal baik di kalangan antar suku dalam negeri maupun mancanegara.

1. Komunikasi

Kegiatan sosialisasi dan promosi terhadap Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae dapat dikatakan masih minim baik itu kepada masyarakat setempat maupun melalui sosial media yang menjadikan informasi tidak tersebar luas secara maksimal. Pola komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan individu atau kelompok yang terkait dengan kebijakan pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae yaitu masyarakat lokal, wisatawan dan beberapa lembaga terkait.

a. Transmisi

Transmisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyaluran informasi mengenai pengembangan potensi dari Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kepada Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait kepariwisataan dan juga kepada masyarakat. Dalam hal pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae, bentuk transmisi disampaikan melalui distribusi informasi dari Pimpinan yakni Kepala Dinas Pariwisata melalui rapat koordinasi dengan bagian dan bidang yang terkait dengan pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae. Bentuk transmisi kepada masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang beranggotakan masyarakat sekitaran Kawasan Wisata Adat Atakkae serta sosialisasi secara tidak langsung sehingga informasi yang diperoleh masyarakat kurang maksimal.

b. Kejelasan

Dalam implementasi kebijakan ini disampaikan hal-hal yang menjadi instruksi dari bupati kepada lembaga-lembaga terkait agar dapat bersifat terbuka terhadap usul ataupun saran dari masyarakat. Untuk arus baliknya, pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo menjalankan fungsi koordinasi dalam rangka menyambungkan aspirasi masyarakat tersebut yang ditampung oleh lembaga-lembaga terkait kemudian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae.

c. Konsistensi

Konsistensi antara pihak pelaksana dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terkhusus dalam bidang kepariwisataan dengan para pihak lain yang terkait baik itu dari instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat dan pemuka adat terkait. Pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae dapat dikatakan tidak konsisten, hal tersebut dapat dilihat pada kondisi terkini Kawasan Wisata Adat Atakkae yang terbengkalai.

2. Sumber Daya

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terkhusus pada bidang pariwisata dapat disimpulkan belum memadai sepenuhnya, dikarenakan (SDM) Sumber Daya Manusia masih belum memiliki pengetahuan khusus dalam bidang pariwisata baik itu dilihat dari latar belakang pendidikan maupun dengan pelaksanaan latihan keterampilan tentang kepariwisataan. Proses pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukungnya. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai akan mempermudah dan mendukung proses pelaksanaan suatu kebijakan, sebaliknya jika sumber daya tidak mencukupi justru akan memperlambat atau mempersulit pelaksanaan suatu kebijakan.

a. Staf

Jumlah dan mutu staf yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pemuda, olahraga dan pariwisata masih kurang dan belum mampu mencukupi kebutuhan sehingga hal ini bisa menjadi hambatan dalam pencapaian kebijakan.

b. Informasi

Belum ada gambar atau tulisan serta pesan terkait pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae. Informasi secara langsung maupun tidak langsung belum tersedia secara resmi dari pihak pelaksana kebijakan. Hal tersebut dikarenakan prioritas pembangunan belum mengarah kesana.

c. Wewenang

Tidak maksimalnya pelayanan yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas, tidak ada yang berjaga dan memandu para wisatawan dalam menjelajahi Kawasan Wisata Adat Atakkae.

d. Fasilitas

Sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pemuda, olahraga dan pariwisata masih kurang dan belum mampu mencukupi kebutuhan sehingga hal ini bisa menjadi hambatan dalam pencapaian kebijakan.

3. Disposisi

Sikap Pelaksana dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bisa dikatakan sudah cukup baik, dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang pariwisata melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, dengan inisiatif ditengah serba keterbatasan, tetapi pengangkatan birokrat yang memiliki keahlian minim khususnya di bidang pariwisata. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, para pelaksana kebijakan seharusnya telah memahami kebijakan yang diputuskan dan ikut mendukung kebijakan tersebut agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

a. Pengangkatan Birokrat

Kendala yang sering dijumpai yakni formalitas dalam bekerja namun sudah menjadi budaya turun-temurun di kalangan para pelaksana kebijakan. Interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

b. Insentif

Dana insentif yang mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas dalam implementasi kebijakan pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae kurang sesuai dengan apa yang akan dicapai sehingga pemerintah memberikan penyesuaian kerja terhadap pegawai honorer.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan bagan atau tatanan suatu organisasi, serta pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga pemerintahan dengan kepentingan untuk menjalankan tugas agar berjalan sebagaimana mestinya. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam hal pelaksanaan kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum optimal dikarenakan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur jalan serta penanganan dampak dari pandemi dan Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae belum terlaksana sesuai SOP.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Agar kegiatan dapat berjalan lancar sebagaimana ketentuan yang berlaku, dengan dasar hukum yang menjadi landasan dalam membuat suatu kebijakan. Dalam hal ini petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wajo (RIPPARKAB) yang menjadi petunjuk pelaksanaan kegiatan atau sebagai pedoman dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Daerah Kabupaten Wajo.

b. Fragmentasi (Koordinasi)

Penyebaran tanggung jawab pelaksanaan terkait implementasi kebijakan pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae dapat dikatakan sudah baik, bagian-bagian yang membawahi tugasnya masing-masing bekerja sesuai dengan batasnya dalam artian Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai bagian satu sama lain.

3.2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

1. Kebijakan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo

Kebijakan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam hal ini pimpinan Kepala Daerah atau Bupati belum memprioritaskan pembangunan di bidang Kepariwisata dan lebih memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur jalan. Amran Mahmud-Amran Sejak awal masa kepemimpinan Beliau yang mencanangkan pembangunan infrastruktur jalan, hal ini merupakan program utama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dengan pertimbangan pembangunan infrastruktur jalan dapat menjadi penunjang berbagai sektor lainnya termasuk pada pengembangan kepariwisataan.

2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae

Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae dapat dikatakan belum optimal, ditandai dengan perubahan yang tidak signifikan terhadap Kawasan Wisata Adat Atakkae dari beberapa tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan tidak mencukupinya anggaran dana untuk merealisasikan penyelenggaraan pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae.

3. Masih Terbatasnya Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Masyarakat lokal sebagai pengelola tidak memiliki keahlian khusus atau latar belakang pelatihan terkait hal hal kepariwisataan dan hanya menunggu instruksi dari atasan. Kurangnya keterampilan khusus tersebut berpengaruh secara berkelanjutan terhadap kondisi Kawasan Wisata Adat Atakkae. Masyarakat lokal sebagai pengelola tidak memiliki keahlian khusus atau latar belakang pelatihan terkait hal hal kepariwisataan dan hanya menunggu instruksi dari atasan. Kurangnya keterampilan khusus tersebut berpengaruh secara berkelanjutan terhadap kondisi Kawasan Wisata Adat Atakkae.

4. Kurangnya pemanfaatan media sosial dan terbatasnya promosi mengenai Kawasan Wisata Adat Atakkae

Target dalam mempromosikan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae belum diprioritaskan. Hal ini merupakan salah satu hambatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mampu membenahi agar dapat menarik wisatawan baik dari dalam maupun dari luar untuk datang.

3.3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

1. Melakukan Koordinasi Kepada Seluruh Komponen yang terkait, baik di Lingkungan Internal Badan/Dinas maupun Masyarakat dan Wisatawan lokal

Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah berupaya melakukan koordinasi kepada setiap unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae ini sehingga dapat

tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis koordinasi yang dilakukan secara eksternal dan internal.

2. Melakukan pembenahan dengan perawatan dan pembersihan secara berkala pada Kawasan Wisata Adat Atakkae

Pemerintah melakukan plan B atau sebuah inisiatif sebagai bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dengan cara ini, setiap objek, sarana dan prasarana akan tetap diawasi dan dapat menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat agar Kawasan Wisata Adat dapat tetap eksis dan diharapkan berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo.

3. Memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia

Pemanfaatan tenaga kerja sudah baik, dengan melakukan monitoring secara berkala pada kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kawasan Wisata Adat Atakkae.

4. Memfasilitasi event atau acara yang diselenggarakan diikuti dengan memperkenalkan Kawasan Wisata Adat Atakkae

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yakni dengan menjadi fasilitator pada event atau kegiatan yang diselenggarakan di Kawasan Wisata Adat Atakkae disertai dengan memperkenalkan Kawasan Wisata Adat Atakkae, dimana dalam hal ini menjadi pendorong untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan dalam pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae dapat dikatakan masih belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perspektif yakni diantaranya komunikasi terkait informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan potensi belum maksimal, Pemanfaatan sumber daya yang belum terarah, komitmen pelaksana yang tidak konsisten serta struktur birokrasi yang mengacu pada standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi Kawasan Wisata Adat Atakkae sebelum dilakukan pengembangan potensi oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek yang terkait didalamnya, dimulai dari posko keamanan yang berantakan dan tidak terurus, beberapa bagian rumah adat yang sudah rusak seperti atap, jendela dan kayu penyangga tiang utama, entitas peninggalan sejarah yang tidak terawat, lahan kosong yang hanya menjadi tempat tumbuh rerumputan, gazebo yang sudah tidak layak pakai, belum tersedianya tempat ibadah atau musala, penjual makanan dan minuman serta tempat penginapan. Hal tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2025.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dalam pelaksanaannya dilapangan masih belum maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Program Prioritas Pemerintah Daerah, belum optimalnya penyelenggaraan pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae, masih terbatasnya pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta kurangnya pemanfaatan media sosial dan terbatasnya promosi mengenai Kawasan Wisata Adat Atakkae. Dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dengan melakukan koordinasi kepada seluruh komponen yang terkait baik di lingkungan internal badan/dinas terkait maupun masyarakat dan wisatawan lokal, melakukan pembenahan dengan perawatan dan pembersihan secara berkala, memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, memfasilitasi

event atau acara yang diselenggarakan diikuti dengan memperkenalkan Kawasan Wisata Adat Atakkae.

Keterbatasan Penelitian: Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yakni faktor waktu serta kondisi yang terjadi dilapangan. Informasi yang diperoleh belum sepenuhnya lengkap baik itu berupa data maupun wawancara serta dokumentasi secara primer dan sekunder.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggali lebih dalam informasi mengenai pengembangan potensi Kawasan Wisata Adat Atakkae dengan melakukan observasi secara berkala dan mengkaji peraturan daerah terkait yakni RIPPARKAB, serta penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memperkuat hasil penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran, serta unsur lain yang telah bersedia untuk berkontribusi dalam pemberian data terkait penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah

Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England

Moleong, L.J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Yoeti, Oka. A. 2010. *Dasar-Dassar Pengertian Hospitali Dan Pariwisata*. Bandung : P.T.Alumni

B. Jurnal dan Skripsi

Lahamadi, Feki dkk. 2016. *Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3 No 400 (2016) : Universitas Sam Ratulangi <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

Nuraimma, 2018. *Strategi Pengembangan Potensi Objek Wisata Rumah Adat Karampuang terhadap Sosial Budaya Masyarakat di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai*. *Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, Vol 2 No 2 (2020) : Pusaka <http://eprints.unm.ac.id>.

Neksen Neri, Agus dkk. 2020. *Implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Alam Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau*. *Journal of Policy & Bureaucracy Management*, Vol. 1 No. 2 (2020): November : Universitas Mulawarman <https://jpbm.fisip-unmul.ac.id>.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2025.

